

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang artinya kekuatan. Pemberdayaan dapat merupakan proses guna memperoleh kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang berdaya.¹¹ Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dengan mendorong potensi yang dimiliki dengan berusaha mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah tindakan yang terealisasi. Sementara menurut Kartasasminta pemberdayaan merupakan usaha untuk membangun apa yang ada pada masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan, kesadaran atas potensi yang dimiliki.

Dalam penerapannya pemberdayaan memiliki arti sebagai motivator dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan langkah-langkah dari suatu proses pemberdayaan guna merubah perilaku, merubah kebiasaan yang lama untuk

¹¹Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm.7.

menuju ke perilaku yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas hidup yang sejahtera.¹²

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki kondisi dan situasi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya akan terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut juga untuk berpartisipasi. Jadi intinya pemberdayaan yaitu meliputi: *proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri*. Dalam kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, namun juga keaktifan dari pihak yang diperdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi yang menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹³

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses untuk membangun individu atau masyarakat dengan mengembangkan kemampuan masyarakat dan merubah perilaku masyarakat. Sedangkan pemberdayaan perempuan yaitu suatu proses pembentukan kapasitas terhadap yang lebih besar seperti kekuasaan dan pengambilan keputusan untuk mengambil suatu tindakan transformasi yang mengarah dalam

¹²Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafi'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remai & Rosdakarya, 2001), hlm.44.

¹³Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm.8.

mewujudkan kesamaan tingkatan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa pemberdayaan yang dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dan upaya guna memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan juga masyarakat yang lemah agar dapat menganalisis kebutuhan, potensi serta masalah yang dihadapi dan juga memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan ditunjukkan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas hidupnya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar yang mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap Individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur paksaan melalui

¹⁴Syafi'i Ma'arif, *Pembangunan Dalam Persepektif Gender*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm.189.

¹⁵Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.60.

berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.

- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan potensi dan kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang memiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup. Aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong-royong, kerjasama, hormat kepada kedua orang tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati

diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah bertahan lama.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat disekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga

lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini dimulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut mulai dari, mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melakukan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan kemampuannya.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai dengan profesi dan keterampilan dari masing-masing individu dengan itu mereka mempunyai bekal kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja dan berusaha hidup mandiri dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Dari pendapat lain mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.¹⁶

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat secara umum diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, merubah perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut, terdapat tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

¹⁶Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Semarang: UNNES Press, 2007), hlm.153.

Secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan keadaan-keadaan untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara berswadaya, dalam hal ini adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat tersebut mampu menetralkan masalah-masalah sosial yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat tersebut mengakibatkan produktifitas mereka menjadi rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat dan kedua pengorganisasian masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuan dari sikap dalam hidupnya.

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”

Dengan perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan terkait kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya dengan baik. dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan lebih mudah

¹⁷Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.9.

untuk di capai. Serta target yang sudah di sepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah untuk direalisasikan.

b. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi pada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan bisa memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

c. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal apabila kualitas manusia tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak

lingkungan. Oleh sebab itu pendapatan masyarakat harus memadai agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Jadi perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” dikarenakan kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas.¹⁸

e. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik juga. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”

Apabila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka bisa

¹⁸Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.10.

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal diantaranya yaitu:¹⁹

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, akan tetapi bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesengsaraan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka bisa meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli ada empat prinsip yaitu:²⁰

- a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-

¹⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.58.

²⁰Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.11.

masing individu harus saling mengakui kelebihan dan kekurangannya, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberi dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini perlu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan "*the have not*", melainkan sebagai subjek yang memiliki

kemampuan sedikit “*the have little*”. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Prinsip Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang agar dapat berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan tapi pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, arena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program ini mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan pada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.²¹

²¹Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.12.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan tahapan pemberdayaan sebagai berikut:²²

a. Penyadaran

Proses penyadaran sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam proses penyadaran juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada proses sosialisasi.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuh kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training (AMT)*, yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

b. Pelatihan

Secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan individu, masyarakat, lembaga dan organisasi. Pelatihan adalah suatu bagaian

²²Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.236.

pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

Sasaran pelatihan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dan mampu mendorong peningkatan ekonomi dipedesaan.

c. Pendampingan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

d. Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan dapat membentuk suatu sistem dalam

masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atas langkah yang harus dilakukan yaitu:²³

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan yang kedua, penyiapan lapangan yang ada pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting agar efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b. Tahap Pengkajian

Tahap ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "*feel needs*" dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

²³Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.13.

Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting agar efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

e. Tahap “Implementasi” program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antarpetugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

f. Tahap Evaluasi

Tahap ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang diharapkan dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang ada pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi.

g. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi dan kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.²⁴

6. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat di setiap daerah atau di setiap regional atau bahkan di setiap negara itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya masyarakat yang kesejahteraannya tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka menjalani kehidupannya. Artinya, mereka tidak tergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan pihak lain, baik pemerintah, para dermawan maupun komponen masyarakat lainnya. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa hidup layak, mereka masih belum bisa mandiri sepenuhnya. Mereka masih harus mendapat bantuan dari pihak lain.

²⁴Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.13.

Bantuan dari pihak lain kepada masyarakat yang belum mampu mandiri itu bersifat mendidik, yang artinya hal tersebut dapat membantu masyarakat tersebut secara sementara sebelum mereka mampu mandiri sepenuhnya. Artinya mental mereka harus dibina untuk bisa bekerja lebih baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa yang akan datang secara bertahap dapat mandiri sepenuhnya.²⁵

7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi, yaitu sebuah pendekatan yang diutamakan pada masyarakat kelas bawah agar mampu bekreatifitas dalam bidang ekonomi dan juga memiliki yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak dari perkembangan ekonomi yang terjadi.²⁶

Melalui program-program pembangunan partisipatif, diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan partisipatif berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari

²⁵Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.15.

²⁶Agus Eko Surjianto, dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Produksi, Konsumsi dan Distribusi Tahu di Pondok Modern Darul Hikam Tulungagung*, (Tulungagung: Cahaya Abadi, 2016), hlm.22.

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi yaitu salah satu bentuk dari program pemberdayaan yang berfokus pada usaha memberdayakan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dalam usaha memberdayakan ekonomi masyarakat diperlukan adanya pendekatan. Adapun pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi ini, ada tiga pendekatan yang bisa diupayakan yaitu:²⁷

- a. Harus terarah dan ditujukan langsung kepada yang memerlukan.
- b. Harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat.
- c. Melalui pendekatan kelompok yang merupakan salah satu pendekatan paling efektif sehingga penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendekatan melalui kelompok merupakan pendekatan yang efektif dalam usaha memberdayakan masyarakat. Dengan menggunakan proses pendekatan kelompok seperti di atas maka keuntungan yang akan diperoleh antara lain yaitu:²⁸

- a. Masyarakat golongan ekonomi lemah yang mempunyai kekurangan akan lebih terbantu karena jika dilakukan bersama-sama akan lebih mudah.

²⁷Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDESINDO, 1996), hlm.231.

²⁸Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat...*, hlm.234.

- b. Dengan mempertimbangkan aspek biaya dan tenaga yang sama besar dan sama jumlahnya maka pendekatan kelompok akan bisa melayani kelompok sasaran yang lebih banyak dan ini berarti efisien secara menyeluruh.
- c. Adanya keterkaitan dengan budaya kita yaitu bahwa hidup berkelompok, sikap bergotong royong dan saling membantu sudah menjadi budaya Indonesia dan apabila diberikan arahan yang bersifat membangun akan lebih mudah untuk dikembangkan.
- d. Lewat pendekatan kelompok bila ada lembaga keuangan yang akan melayani pinjaman permodalan maka nilai resiko kemacetan akan dapat ditekan. Hal ini disebabkan dalam kelompok terdapat proses kontrol sosial yang tinggi dan dimungkinkan adanya sistem tanggung jawab bersama.
- e. Lewat pendekatan-pendekatan kelompok ada rasa solidaritas di antara anggota.
- f. Lewat pendidikan kelompok terjadi proses belajar mengajar di antara anggota. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai kesempatan seperti pertemuan rutin secara periodik.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan sebuah kelompok akan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena, pendekatan melalui kelompok ini berdasarkan atas unsur kebersamaan dan tanggung jawab moral yang merupakan landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam usaha

yang mandiri melalui kelompok, kesulitan yang dihadapi akan mudah dipecahkan bersama-sama seperti sulitnya modal, kurangnya pengetahuan dan strategi pemasaran produk mereka.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Keberdayaan masyarakat miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh masyarakat miskin secara kolektif dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan atau aset keluarga miskin. Keberdayaan masyarakat miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas masyarakat miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.

Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Islam sendiri telah dicontohkan pada masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (Istri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Saking binti Malhan yang menekuni bidang tatarias pengantin, istri Abdullah Ibn Mas'ud dan Qillat Ummi Bani anwaryang dikenal sebagai wiraswastawan yang sukses, Al-Syifa yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah,

dan lain-lain. Begitu aktifnya kaum perempuan pada masa Nabi, Aisyah pernah mengatakan: “Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik dari pada tombak di tangan kaum laki-laki”. Dalam suatu riwayat lain, Nabi pernah mengatakan: “Sebaik-baik permainan seorang Muslim di dalam rumahnya adalah memintal/menenun”.²⁹

Islam menekankan kepada umatnya untuk bekerja. Sebagaimana dalam sabda-Nya bahwa “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok”. Maryoto berpendapat manusia dalam aktifitas kebiasaannya memiliki semangat untuk mengerjakan sesuatu asalkan dapat menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh dirinya memiliki suatu nilai yang sangat berharga, yang tujuannya jelas pasti untuk melangsungkan kehidupannya, rasa tentram, rasa aman dan sebagainya. Firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zumar: 39.³⁰

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَآ تَنۡبِغۡمُ اِنۡىۡ عَمِلُۙ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ { ۳۹ }

Artinya: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui,” (QS. Az-Zumar: 39)

Ayat diatas menyuruh dan memotivasi kita untuk bekerja. Dengan bekerja kita bukan hanya mendapat penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari

²⁹Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 53.

³⁰Nasrudin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 1999), hlm.34.

ibadah. Seorang muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hendaknya para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhir dari pekerjaan yang mereka lakukan, karena tujuan utama dari bekerja menurut Islam adalah memperoleh keridhaan Allah SWT.

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara gabungan. Menurutny, tidak ada literatur yang mengemukakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Meskipun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa kondisi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.³¹

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras pemberdayaan (*empowerment setting*):³²

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam

³¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.66.

³²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,,, hlm.67.

menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Besar (*large-system-strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi dan kondisi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu tersebut lebih berdaya. Kecenderungan pertama dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

kemampuan atau keberdayaan untuk menekaankan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sumardjo menyebutkan beberapa ciri-ciri masyarakat yang berdaya yaitu:³³

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan).
- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- e. Bertanggung jawab atas tindakannya.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-undang No . 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUMdesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang

³³Hany Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2005), hlm.8.

sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan tergantungnya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.³⁴

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas sendiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dalam peraturannya dalam eraturan daerah (Perda) maupun peraturan desa (Perdes). Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa.

Jadi BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hlm.4.

Tujuan pendirian BUMDes seperti yang dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah:³⁵

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*lokal wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)..., hlm.12.

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijaksanaan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan anggota).³⁶

Didalam Buku Panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional.³⁷ Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:³⁸

1. *Korporatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik dari pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela dan memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

³⁶Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.51.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hlm.13.

³⁸Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm.13.

4. *Transparan*, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dan harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif,.
6. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi pedesaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan desa. Namun harus diakui bahwa masih banyak titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong organisasi pedesaan agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan, sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.

D. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang direncanakan oleh sebuah lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah lembaga milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kemampuan dan potensi desa. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan dapat memberdayakan masyarakat

dalam mengembangkan perekonomian desa. Dalam pengelolaannya masyarakat harus terlibat dari awal pendirian lembaga tersebut supaya dapat mengetahui dan memahami kegiatan lembaga tersebut.³⁹

Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam tersebut adalah bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Hal ini dijelaskan di dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.....وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَنفُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { ٢ }

Artinya: “.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah: 2).⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa dianjurkannya kita sebagai manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan yang termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu dalam kegiatan simpan pinjam terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan sesama manusia.

1. Tujuan Dan Sasaran SPP

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial skala dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong

³⁹Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm.35.

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm.106.

pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Yang menjadi sasaran dari kegiatan SPP yaitu masyarakat miskin yang produktif dan memerlukan dana untuk usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar melalui kegiatan SPP yang ada di desa. Selain itu bentuk dari kegiatan SPP ini yaitu pemberian pinjaman untuk modal usaha bagi kelompok perempuan yang memiliki pengelolaan dana simpanan dan pinjaman.⁴¹

2. Ketentuan Dasar SPP

Ketentuan dasar kegiatan SPP adalah kemudahan, keterlembagakan, keberdayaan, pengembangan, dan akuntabilitas. Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Keberadaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan artinya keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Akuntabilitas artinya

⁴¹Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM mandiri Pedesaan*, (Jakarta, 2010), hlm.5.

dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat

Dana BLM adalah dana yang disediakan oleh BUMDes untuk mendanai kegiatan usaha melalui proses perencanaan dengan ketentuan alokasi dana kegiatan SPP per kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. Sasaran program SPP adalah RTM yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun, mempunyai kegiatan simpan pinjam dan dana pinjaman yang telah disepakati. Kemudian telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota, kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik, dan mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

4. Mekanisme Pengelolaan SPP

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus ditetapkan dalam SPP mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM, hal ini didasari oleh beberapa kondisi

diantaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dana UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Adapun tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:⁴²

a. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD (Musyawarah Antar Desa) atau BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa).

b. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat kelompok ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

c. Verifikasi oleh Tim Verifikasi

Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

⁴²PTO Penjelasan X: *Pengelolaan Dana Bergulir*, Jakarta, hlm.3.

d. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

Selain itu mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program, ada beberapa penjelasan mengenai tahapan sebagai berikut:⁴³

a. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi

Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa yang berkumpul di kecamatan memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya.

b. Musyawarah Desa Sosialisasi

Dalam Musyawarah Desa (Musdes) sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

c. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun dengan menyesuaikan ketentuan tersebut termasuk kondisi anggota. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar RTM yang akan menjadi pemanfaat. Kemudian

⁴³Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, (Jakarta: 2007), hlm.58.

RTM yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat. Untuk hasil musyawarah dusun, dilampirkan dalam berita acara.⁴⁴

d. Musyawarah Desa dan Masyarakat Khusus Perempuan

Musyawarah ini merupakan tahap seleksi ditingkat desa. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. Penulisan usulan kelompok yaitu tahap yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompertisikan ditingkat kecamatan.

e. Verifikasi

Verifikasi kegiatan SPP dibantu dengan formulir yang tersedia. Format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal akan tetapi tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (*Capital Assets Management Earning Liquidity*) yaitu: penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

Proses pelaksanaan verifikasi kelompok SPP, mencakup penilaian dan verifikasi atas proposal yang diajukan kelompok-kelompok SPP yang berisi pengalaman kegiatan simpan pinjam, pemenuhan terhadap persyaratan sebagai kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian permodalan, kualitas pinjaman,

⁴⁴Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)..., hlm.59.

administrasi dan pengelolaan, pendapatan dan likuiditas (pendanaan jangka pendek), penilaian khusus rencana kegiatan, dan jumlah RTM sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar RTM. Dalam proses verifikasi juga perlu melakukan penilaian kategorisasi kelompok menjadi kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok siap sesuai kriteria program.

Pembuatan berita acara hasil verifikasi sebagai tahap akhir proses verifikasi usulan, mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan RTM sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok.⁴⁵

f. Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan

Tahap ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan modal prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori RTM. Dalam tahap prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian ini dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga apabila ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap tidak layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

⁴⁵Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)...., hlm.61.

Prioritas kebutuhan kelompok SPP mempertimbangkan keterlibatan RTM sebagai anggota dan pemanfaat, kategori tingkat perkembangan kelompok, hasil penilaian kelayakan kelompok pengurus yang dilampirkan dalam berita acara tim verifikasi, dan pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah RTM dan peningkatan kesempatan kerja atau usaha.

g. Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan

Pada tahap ini diambil keputusan penentuan pendanaan usulan kelompok-kelompok yang memenuhi syarat yang dapat didanai dengan dana BLM. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir, maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.

h. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang terutang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan, jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok, dan penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.⁴⁶

⁴⁶Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)..., hlm.62.

i. Pencairan Dana

Pencairan dana BLM dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok yang disertai penandatanganan perjanjian pinjaman antara kelompok dan UPK. Pada saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dan SPP setelah dikurangi operasional UPK (2%) dan operasional desa (3%).

j. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal yaitu pengelolaan data kelompok dan pinjaman atau pemanfaat, pengelolaan dokumen proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyaluran: Kwitansi atau SPPB. Pengelolaan administrasi meliputi: rekening pengembalian SPP, buku kas harian, kartu pinjaman. Pengelolaan peloran meliputi: laporan realisasi penyaluran, laporan perkembangan pinjaman SPP, laporan kolektibilitas SPP, neraca, laporan operasional.

k. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi: data-data peminjam, dokumen pendanaan atau kwitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian atau kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman atau pemanfaat.⁴⁷

⁴⁷Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)...., hlm.63.

l. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdani oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi, maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan berita acara. Selain menetapkan daftar tunggu, juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

m. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup pelestarian kegiatan dan pengembangan kelompok. Pelestarian kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, pelestarian prinsip PNPM-MPd terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi, penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok, Pengembangan layanan kepada masyarakat, dan pengembangan permodalan.

n. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga

mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitas pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dan bergulir.⁴⁸

E. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Sedangkan menurut HAM, definisi kesejahteraan yaitu bahwa setiap laki-laki atau perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁴⁹

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera

⁴⁸Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)..., hlm.64.

⁴⁹Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.24.

dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai persamaan hidup yang tingkatannya lebih dari sekedar kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila sudah merasa senang dan tidak kurang satu apapun dalam batas yang mungkin tercapai serta terlepas dari kekurangan dan terhindar dari bahaya yang akan mengancam.⁵⁰

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat diketahui dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan juga kualitas kesehatan yang tambah meningkat dan merata.⁵¹ Kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan bagi semua orang secara keseluruhan dalam anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan keadaan dalam kehidupan masyarakat yang dapat lihat melalui standar kehidupan masyarakat.⁵²

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses

⁵⁰Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011), hlm.22.

⁵¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Pratama, 2015), hlm. 86.

⁵²Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm.145.

masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.⁵³

1. Kesejahteraan Umum dan Kesejahteraan Ekonomi

Ilmu ekonomi kesejahteraan hanya berhubungan dengan yang bersifat ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dalam pengertian ini adalah kepuasan yang diturunkan dari penggunaan barang dan jasa yang dapat dipertukarkan. Pendapat Pigou di atas dikritik oleh Graaff karena: (1) pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan uang tidak selalu akurat, (2) pendapat Pigou tidak memperoleh pengesahan karena kesejahteraan ekonomi dapat diinterpretasikan hanya untuk barang-barang yang dapat dipertukarkan saja. Kesejahteraan sekelompok manusia atau perorangan tergantung beberapa faktor, sebagian merupakan faktor ekonomi sedangkan yang lainnya merupakan faktor non ekonomi, seperti faktor sosial politik.⁵⁴

Kesejahteraan tidak hanya tergantung pada variabel-variabel ekonomi saja, namun juga pada variabel-variabel non ekonomi yang berpengaruh terhadap variabel ekonomi. Walaupun faktor-faktor non ekonomi mempengaruhi faktor-faktor ekonomi, tetapi faktor-faktor non ekonomi tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi. Dalam berbagai kasus, sebagian besar ahli ekonomi hanya memperhitungkan

⁵³Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA, 1998), hlm.146.

⁵⁴Achmad Daengs GS, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), hlm.106.

variabel-variabel ekonomi dalam analisis kesejahteraan dan variabel-variabel non ekonomi dianggap konstan.

2. Kesejahteraan Individu dan Kesejahteraan Sosial

Para ahli ekonomi modern berusaha untuk mempertahankan sifat objektif dari kesejahteraan individu dengan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu. Sebagai contoh seorang yang memiliki skala preferensi tertentu lebih memilih A dari pada B, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi di A dari pada B. Pilihan yang dilakukan oleh individu sebagai uji yang objektif untuk membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Konsep kesejahteraan sosial bukan merupakan hal yang mudah, mengukur kesejahteraan sosial merupakan hal yang tidak mungkin. Mereka tidak dapat membandingkan kesejahteraan sosial dalam situasi yang berbeda melalui media pilihan sosial. Hal ini karena pilihan sosial penjumlahan dari pilihan-pilihan individu. Dengan sederhana dikatakan bahwa kesejahteraan sosial sebagai penjumlahan dari kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.

Fungsi kesejahteraan secara langsung adalah suatu fungsi dari tingkat utilitas individu-individu dan secara tidak langsung merupakan suatu fungsi dari konsumsi individu-individu. Terdapat tiga konsep kesejahteraan sosial yang berbeda yaitu:⁵⁵

- a. Konsep kesejahteraan sosial paretian. Konsep ini digunakan oleh pareto dan para penerusnya. Menurut konsep ini kesejahteraan masyarakat

⁵⁵Achmad Daengs GS, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi...*, hlm.107.

tergantung pada kesejahteraan secara kolektif yang terdiri dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa apabila sekurang-kurangnya satu orang menjadi lebih baik dan tidak seorangpun menjadi lebih buruk keadaannya maka kesejahteraan sosial mengalami kenaikan.

- b. Konsep kesejahteraan sosial Bergson. Konsep ini mencakup lebih banyak kasus dimana perubahan organisasi ekonomi membuat beberapa orang menjadi lebih baik dan orang lain menjadi lebih buruk. Dalam konsep tersebut dapat dibuat pertimbangan nilai secara eksplisit, misalkan dalam fungsi yang sederhana dapat ditunjukkan bagaimana kesejahteraan seseorang ditambahkan pada kesejahteraan orang lain.
- c. Konsep kesejahteraan sosial Paternalist. Yaitu konsep yang menggambarkan pandangan-pandangan penguasa paternalis atau negara, dan bukan individu-individu atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai ide tentang kesejahteraan sosial maksimum yang akan dicapai.

3. Kesejahteraan Dalam Persepektif Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain islam (dengan

segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.⁵⁶

Hubungan antara syariat islam dengan kemaslahatan. Ekonomi islam merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekunder dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional,

⁵⁶Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019), hlm.99.

sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu ada tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: (1) untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, (2) untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, (3) untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁵⁷

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang dikenal dengan istilah (*al-maslahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seseorang muslim dalam menjalankan hanya perannya sebagai khalifah di muka bumi dimana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam

⁵⁷Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan...*, hlm.100.

rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.⁵⁸

Di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. namun demikian penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl : 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٩٧}

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang

⁵⁸Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan...*, hlm.101.

halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.⁵⁹

F. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Aulia Rahmah Aprili dan Muhtadi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja dan bagaimana strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bank sampah dinilai efektif dilaksanakan sebab menunjang segala aspek pemberdayaan perempuan yang ada didalamnya sudah sesuai dengan teori yang ada.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria yang berjudul “Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes beserta implikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini yaitu proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BUMDes

⁵⁹P. Pardomuan Siregar, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan: Jurnal Bisnis Net Vol. 1 No. 1, Januari 2018, ISSN: 2021-3982), hlm. 7-8.

⁶⁰Aulia Rahmah dan Muhtadi, *Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 2, Desember 2020)

Maju Makmur yaitu dengan memberikan modal kepada masyarakat, pemasaran, kemitraan serta penguatan kelembagaan serta dampak dengan adanya BUMDes adalah bertambahnya modal usaha, meningkatnya produksi masyarakat, kemudahan mendapatkan sarana pertanian, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta kehidupan sosial.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Ananda Citra yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan potensi sumber daya pesisir untuk pengembangan ekowisata, 2) Menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekowisata di pesisir di Kabupaten Buleleng. Metode Penelitiannya adalah survei dan didukung dengan metode observasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) Sumber daya pesisir di Kabupaten Buleleng yang meliputi: (1) sumber daya hayati yaitu potensi perikanan dan terumbu karang, (2) sumber daya buatan yaitu dermaga dan (3) sumber daya jasa-jasa lingkungan yaitu keindahan terumbu karang, atraksi lumba-lumba dan pemandangan *sunset* sebagai potensi ekowisata. 2) Strategi pengembangan sumber daya pesisir untuk pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan, pelestarian terumbu karang, pelatihan peningkatan pelayanan wisata, penyediaan tempat pelelangan ikan,

⁶¹Fitria, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Furqon Prabumulih, Vol. 1, Nomor. 1 Mei 2020).

pengadaan modal dan kerjasama bagi usaha-usaha masyarakat dalam membuat kerajinan tangan, penegakan hukum.⁶²

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahrul Rizki yang berjudul “Strategi Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BUMDes dalam pengembangan usaha kebun singkong di Desa Tepian Makmur, Mengetahui faktor pendukung dalam proses pengembangan usaha kebun singkong gajah di Desa Tepian Makmur, mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan usaha kebun singkong gajah di Desa Tepian Makmur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha kebun singkong gajah yang dilakukan oleh BUMDes Tepian Makmur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Dengan didukung minat masyarakat yang tinggi, kondisi tanah yang baik, sarana, serta lokasi pabrik yang strategis.⁶³

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto yang berjudul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan tata kelola

⁶²I Putu Ananda Citra, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng*, (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, Vol. 6, No. 1, April 2017)

⁶³Muhammad Bahrul Rizki, *Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*, (Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Vol. 6, Nomor. 4 2018)

BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.⁶⁴

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara” Tahun 2020 oleh Aulia Rahmah dan Muhtadi.	Sama-sama membahas mengenai strategi pemberdayaan dan metode yang digunakan juga sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Lokasi penelitian berbeda, pada penelitian yang saya lakukan pemberdayaan dilakukan melalui BUMDesma Besuki Tulungagung sedangkan pada penelitian ini melalui pengelolaan bank sampah saraswati Cipete Utara.
2	“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” Tahun 2020 oleh Fitia.	Metode yang digunakan sama dengan menggunakan pendekatan kualitatif .	Lokasi penelitian berbeda, pada penelitian saya meneliti BUMDesma untuk satu kecamatan sedangkan penelitian ini meneliti di BUMdes untuk satu desa.

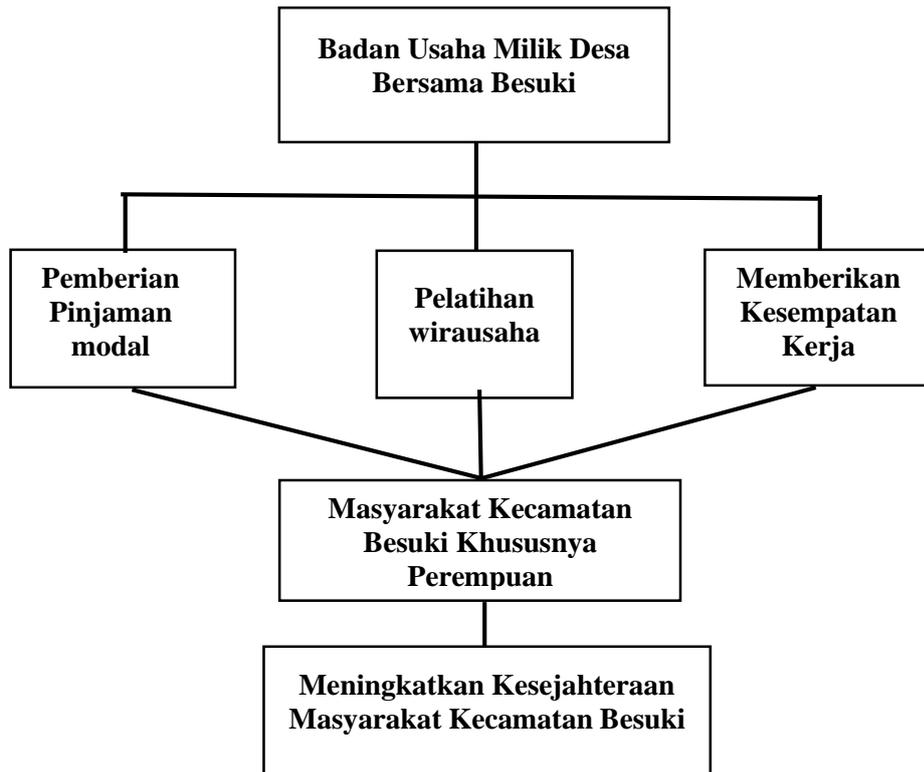
⁶⁴Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Universitas Diponegoro Semarang, Vol.13, No. 1 Maret 2016).

3	<p>“Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng” Tahun 2017 oleh I Putu Ananda Citra.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dan pendekatan penelitian juga sama dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Lokasi penelitian berbeda, pada penelitian saya lebih fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sedangkan pada penelitian ini untu pengembangan ekowisata wilayah pesisir di Kabupaten Buleleng.</p>
4	<p>“Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur” Tahun 2018 oleh Muhammad Bahrul Rizki.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai strategi BUMDes serta kendala kendala yang di hadapi BUMdes dalam menjalankan kegiatannya. Penelitian ini mengguakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Lokasi penelitian berbeda dan pada penelitian yang saya teliti lebih fokus pada strategi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini fokus pada pengembangan usaha kebun singkong.</p>
5	<p>“Pengembangan Desa mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” tahun 2016 oleh Edy Yusuf Agunggunanto, dkk.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai program BUMDes dan metode yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif.</p>	<p>Lokasi penelitian berbeda dan pada penelitian yang saya teliti mengenai strategi pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengembangan desa yang dilakukan melalui pengelolaan BUMDes.</p>

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Kenseptual



Keterangan:

Dari kerangka konseptual diatas, maka dapat dijelaskan bahwa BUMDesma Besuki merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa. Dimana lembaga tersebut memberikan pinjaman modal, pelatihan wirausaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat desa khususnya kaum perempuan yang memiliki pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman. Sasaran dari adanya program yang di terapkan oleh BUMDesma Besuki tersebut adalah masyarakat Kecamatan Besuki khususnya kaum perempuan, dan program

ini banyak membantu masyarakat kecamatan Besuki. Program ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Besuki.